

DUALISME KEPEMIMPINAN KESULTANAN PALEMBANG DARUSSALAM ("Menguak" Perselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II")

Ravico

STKIP-PGRI Lubuklinggau

Vico.sufi@gmail.com

***Abstract:** The conflict between Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) with Sultan Najamuddin II (SAN II) at the end of the Sultanate of Palembang Darussalam is one of the causes of the collapse of the Empire. Both use various integrus and strategies for each other down. Colonial involvement adds to the severe State of the Sultanate of Palembang Darussalam. This study uses the methods of historical research with the steps: Heuristics, verification, inepretations, and historiography, as well as the social approach to uncover such disputes. The dispute is the impact of disappointment among both parties in an attempt to scramble for the throne and pretise so impactedby the outbreak of various wars.*

Konflik antara Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) dengan Sultan Ahmad Najamuddin II (SAN II) di masa akhir Kesultanan Palembang Darussalam merupakan salah satu penyebab dari runtuhnya kesultanan. Keduanya menggunakan berbagai intrik dan strategi untuk saling menjatuhkan. Keterlibatan kolonial menambah parah keadaan Kesultanan Palembang Darussalam. Kajian ini menggunakan metode penelitian sejarah dengan langkah-langkah: Heuristik, verifikasi, interpretasi dan historiografi, serta menggunakan pendekatan sosial untuk mengungkap perselisihan tersebut. Perseselisihan tersebut merupakan dampak kekecewaan diantara kedua belah pihak dalam upaya perebutan tahta dan pretise sehingga berdampak dengan meletusnya berbagai peperangan.

***Keyword:** Disputes, SMB II and SAN II*

LATAR BELAKANG

Keberhasilan Sultan Muhammad Bahauddin dalam membangun peradaban Islam di masa pemerintahannya 1774-1803 membuat Kesultanan Palembang Darussalam perlu diperhitungkan dalam kanca internasional. Keberhasilannya pada bidang politik, budaya, ekonomi dan perdagangan membuat rakyat Palembang menjadi makmur. Atas keberhasilan tersebut Kesultanan Palembang memperoleh gelar *Darussalam* yang berarti tempat yang tenteram dan makmur atau di Eropa dikenal dengan julukan *de Stad der Vredes* (Hanafiah,1989:8). Inilah warisan yang nanti diterima oleh Raden Hasan Pangeran Ratu atau lebih dikenal dengan Sultan Mahmud Badaruddin II dari ayahnya.

Masa Sultan Mahmud Badaruddin II (SMB II) tidak banyak pembangunan yang diraih. Masa SMB II, konflik elit politik tidak pernah kunjung selesai hingga jatuhnya kekuasaan Kesultanan Palembang Darussalam ke tangan elit politik Belanda. Dalam catatan sejarah, pengkhianatan para bangsawan (elit) seperti pengkhianatan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Husin Diauddin (Ahmad Najamuddin II), ia bersekutu dengan elit politik Belanda untuk menjatuhkan kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II. Belanda menjanjikan kedudukan anaknya Prabu Anom sebagai Sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV. Sedangkan Ia menjadi Susuhunan (Hanafiah,1986:17).

Tahun 1812 awal perselisihan terjadi, Pengkhianatan terjadi ketika perang Kesultanan Palembang Darussalam melawan kolonial Inggris dan Raden Husin Dhiauddin menjadi panglima perang yang menjaga benteng pertahanan Pulau Borang yang saat itu merupakan benteng pertahanan terkuat. Raden Husin Dhiauddin yang bergelar Pangeran Adipati Husin Dhiauddin membiarkan Inggris masuk tanpa ada perlawanan dan tanggal 24 April 1812 Pulau Borang dapat dikuasai oleh Inggris (Mahruf,1999:5).

Setelah Pulau Borang telah dikuasai, Maka Keraton Kuto Besak dapat di kuasai oleh Inggris dan Inggris menjanjikan Pangeran Adipati Husin Dhaudin diangkat menjadi sultan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin II. Pengangkatan ini menjadi problem di masyarakat Kesultanan Palembang Darussalam, secara resmi Kolonial Inggris Sultan Ahmad Najamuddin II menjadi sultan resmi di Kesultanan Palembang Darussalam, akan tetapi masyarakat lebih memilih Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai sultan yang sah. Kondisi ini membuat terjadinya dualisme kepemimpinan di Kesultanan Palembang Darussalam.

Konflik elit politik memang tidak dapat dihindarkan selama sistem politik masih berjalan. Perebutan kekuasaan, prestise dan kehendak memonopoli perdagangan yang menimbulkan konflik elit politik bukanlah alibi dasar bagi munculnya konflik. Sangat tidak berimbang jika hanya untuk memperoleh kekuasaan, prestise dan menguasai monopoli harus mengorbankan putusnya ikatan kekerabatan serta hilangnya nyawa rakyat yang tidak terlibat dalam konflik para elit tersebut. Menurut penulis pasti ada nilai strategis yang menimbulkan adanya konflik. Oleh karena itu, perlunya pengkajian yang mendalam mengenai nilai strategis yang menjadi penyebab timbulnya konflik di kalangan elit politik di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam.

Di latar belakang oleh permasalahan di atas, mengugah perhatian penulis untuk mengkaji lebih dalam tentang **“Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam :“Menguak” Perselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II”**.

Rumusan Masalah

Dari uraian di atas yang menjadi masalah pokok penelitian adalah Bagaimana Dualisme kepemimpinan di Kesultanan Palembang Darussalam berlangsung? Untuk mempermudah permasalahan pokok tersebut maka dirumuskan sub-sub masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana awal konflik munculnya dualisme kepemimpinan tersebut?
- b. Bagaimana eskalasi konflik yang muncul dari dualisme tersebut?

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian *historis* (sejarah) yang berupaya menyelidiki sejarah dualisme kepemimpinan di Kesultanan Palembang Darussalam. Dilihat dari jenis dan tema penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan laboratoriumnya adalah perpustakaan, maka alat heuristiknya adalah katalog-katalog. Adapun teknik pengumpulan data dengan kegiatan membaca, mencatat sumber data, dan mengkategorikan data berdasarkan sub-sub pembahasan. Setelah data telah dikumpulkan maka data tersebut di verifikasi (kritik terhadap sumber). Kritik terhadap sumber data dilakukan dengan kritik interen dan eksteren (Dudung,2011:114).

Langkah selanjutnya menginterpretasi menjelaskan bahwa kedua analisis dan sintesis dipandang sebagai metode-metode utama dalam interpretasi. Langkah akhir yaitu historigrafi, historigrafi adalah langkah final dari rangkaian penelitian yang dilakukan. Sebagai tahap akhir, penulis berusaha menyajikan hasil penelitian sebaik mungkin

dalam bentuk sejarah sebagai sebuah peristiwa yang dituangkan.

Pembahasan

Setelah Sultan Muhammad Bahauddin wafat tahun 1803, kedudukan tahta sultan diserahkan secara adat kepada Raden Hasan Pangeran Ratu dengan gelar Sultan Mahmud Badaruddin II. Secara politik, ketika pergantian kekuasaan dari Sultan Muhammad Bahauddin hingga Sultan Mahmud Badaruddin II, di dalam lingkungan keraton relatif tidak terjadi gejolak politik. Hukum di dalam pemerintahan benar-benar diberlakukan dengan baik dan tegas (Utomo dkk,2005:188).

Di awal pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II tidak ada konflik yang muncul di permukaan, akan tetapi benih-benih konflik dapat dirasakan. Bentuk pemerintahan yang monarki dan adanya stratifikasi dalam tatanan para priyayi merupakan benih-benih konflik di setiap negara yang berbentuk monarki tak terkecuali Kesultanan Palembang Darussalam. Sultan Mahmud Badaruddin II berupaya menghindari munculnya konflik internal dan kudeta sebagaimana sebelumnya terjadi pada masa awal berdirinya Kesultanan Palembang Darussalam, ia kemudian mengangkat beberapa keluarganya masuk dalam teras elit politik. Seperti mengangkat adiknya Raden Husin Dhiauddin sebagai Pangeran Adipati Negara, selaku pelaksana pemerintahan sehari-hari didampingi oleh kepala pemerintahan setempat yaitu Pangeran Temenggung Suro Nandito dan tiga orang anggota dewan menteri yaitu Pangeran Natadiraja, Pangeran Wira Nandita dan Pangeran Nata Agama. Sedangkan Pangeran Adikusuma diangkat menjadi Pangeran Aryakusuma dan Pangeran Nata kusuma diangkat menjadi Pangeran Suryakusuma (Akib,1978:17).

Sultan Mahmud Badaruddin II berhasil meredam benih-benih konflik internal yang muncul dari tahun 1803-1811. Namun tahun 1812 konflik internal muncul ke

permukaan ketika terjadi pengkhianatan yang dilakukan oleh saudara kandung Sultan Mahmud Badaruddin II yaitu Raden Husin Dhiauddin. Pengkhianatan terjadi ketika perang Kesultanan Palembang Darussalam melawan kolonial Inggris dan Raden Husin Dhiauddin menjadi panglima perang yang menjaga benteng pertahanan Pulau Borang yang saat itu merupakan benteng pertahanan terkuat. Raden Husin Dhiauddin yang bergelar Pangeran Adipati Husin Dhiauddin membiarkan Inggris masuk tanpa ada perlawanan dan tanggal 24 April 1812 Pulau Borang dapat dikuasai oleh Inggris (Mahruf,1999:5).

Peristiwa tersebut membuat Sultan Mahmud Badaruddin II sangat terkejut, kemudian Sultan beserta keluarga dan diikuti oleh abdi-abdi setianya meyingkir ke Bailangu. Semua sarana kebesaran Sultan serta harta kekayaan dan seluruh pembendaharaan keuangan diangkut dengan berpuluh-puluh perahu sehingga keadaan keraton menjadi kosong (Mahruf,1999:5). Di keraton hanya ada Pangeran Adipati Husin Dhiauddin yang memiliki garis keturunan dari Kesultanan Palembang Darussalam. Kemudian, Raffles yang telah menduduki keraton tidak mau dianggap gagal. Raffles mengangkat Pangeran Adipati Husin Dhiauddin sebagai Sultan Palembang dengan gelar Sultan Ratu Ahmad Najamuddin II, untuk mendapatkan keinginannya menguasai Pulau Bangka dan hak monopoli atas timah (Hanafiah,1989:65).

Pengkhianatan yang dilakukan oleh Sultan Ahmad Najamuddin II, dalam psikoanalisis, antagonisme politik tersebut merupakan akibat frustrasi psikologis yang kurang lebih berhubungan dengan konflik di masa kanak-kanak yang dini yang terkubur dalam alam tidak sadar. Pengalaman-pengalaman dari masa kanak-kanak mempunyai pengaruh yang menentukan terhadap perkembangan psikologi berikutnya dari seorang individu. Dalam masa kanak-kanak yang dini, orang tua memiliki peranan

yang sangat penting dalam pembentukan pribadi mereka. Selain itu, hubungan orang tua secara tidak sadar mempengaruhi semua hubungan sosial lainnya, terutama yang menyangkut otoritas (Duverger,2003:176).

Kehidupan masa kanak-kanak Sultan Ahmad Najamuddin II telah berlimpah kehormatan dan kekayaan. Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan anak kesayangan dari ibunya Ratu Agung sehingga kehidupannya sangat dimanja dan semua keinginannya selalu terpenuhi. Berbeda dengan kakaknya Sultan Mahmud Badaruddin II yang memang dipersiapkan untuk menjadi sultan menggantikan ayahnya, kehidupan kanak-kanak Sultan Mahmud Badaruddin II diisi dengan belajar berbagai ilmu pengetahuan baik itu agama maupun umum, tidak mengherankan jika ia mampu menguasai strategi perang, bahasa Arab dan Portugis (Akib,1978:16-17).

Ratu Agung sebagai permaisuri pernah meminta kepada suaminya Sultan Muhammad Bahauddin agar dikemudian hari mengangkat Ahmad Najamuddin II menjadi sultan menggantikan suaminya. Namun dalam musyawarah negara yang dihadiri oleh permaisuri, sultan beserta kedua putra mahkota dan para pembesar lainnya yang ikut hadir membicarakan masalah pengganti sultan. Dalam musyawarah tersebut memutuskan bahwa tiap-tiap orang yang dilahirkan lebih dahulu dari yang lainnya itu tentu dengan kehendak Allah jua dan tidak percuma pula dan sudah tentu ada maksud dan tujuannya. Oleh sebab itu maka yang muda harus menghargai yang lebih tua umurnya dan yang lebih muda harus menerima nasehat yang lebih tua (Akib,1987:17). Jika diamati, keputusan musyawarah tersebut cukup menyakitkan bagi Ahmad Najamudin II yang memang telah mendambakan kedudukan sebagai sultan. Sehingga, ia dengan rasa frustasinya melakukan berbagai upaya untuk menduduki tahta sultan.

Hal tersebut senada dengan teori frustasi, menurut teori frustasi sikap agresif dan kekerasan bukan karena instinknya manusia melainkan karena frustasi, sehingga kalau tidak ada frustasi maka tidak ada pula kekerasan dan konflik. Hal berbeda yang diuraikan oleh Fromm seorang ilmuan sosial yang membangun teori berdasarkan teori psikologi dan sosiologi yang banyak melakukan kajian mengenai potensi konflik dalam diri manusia. Ia tidak menyangkal adanya potensi agresif dalam tubuh manusia, tetapi menurutnya tindak agresif-deskrutif tersebut muncul karena adanya kondisi eksternal yang ikut menstimulir (Affandi,2004:85). Kehadiran kolonial Inggris di Kesultanan Palembang Darussalam yang kemudian melakukan agresi militer merupakan stimulasi eksternal atau faktor penyebab bagi Ahmad Najamuddin II melampiaskan wujud frustasinya untuk mencapai keinginannya menduduki tahta sultan.

Pemerintahan Kesultanan Palembang Darussalam yang dipimpin Sultan Ahmad Najamuddin II berada di bawah bayang-bayang pemerintahan kolonial Inggris di Batavia. Setelah kondisi dianggap kondusif, Kapten Meares ditunjuk sebagai residen dan komandan di Pulau Bangka dengan tugas tambahan sebagai residen di Kesultaan Palembang Darussalam. Kapten Meares mendapat perintah penangkapan Sultan Mahmud Badaruddin II. Usaha penangkapan Sultan Mahmud Badaruddin II mengalami kegagalan dengan keadaan Kapten Meares tertembak dalam perang yang ditimbulkannya. Kapten Meares tidak dapat bertahan lama akibat luka di tubuhnya, tanggal 15 September 1812 ia meninggal (Hanafiah,1989:66).

Setelah Kapten Meares meninggal, Mayor Robinson diangkat sebagai residen Bangka dan Palembang. Tanggal 13 Febuari 1813 Mayor Robinson mulai bertugas, ia mulai mengkaji ulang kebijakan-kebijakan Raffles terhadap Sultan Mahmud Badaruddin

II. Menurutnya Sultan Mahmud Badaruddin II tidak mungkin dikalahkan dengan kekuatan senjata (PemProv,1986:36). Robinson menempuh jalan damai dan berhasil mengadakan kontak dengan Sultan dan menawarkan kepada Sultan tempat tinggal dan perlindungan.

Kontak antara Robinson dengan Sultan Mahmud Badaruddin II menghasilkan Perjanjian Musi Rawas yang dibuat pada tanggal 29 Juni 1813. Perjanjian ini menyatakan bahwa Sultan Mahmud Badaruddin II dikembalikan menduduki tahta di Palembang. Tanggal 13 Juli 1813, Sultan Mahmud Badaruddin II memasuki Palembang dan duduk sebagai sultan yang berdaulat. Sultan Mahmud Badaruddin II mendiami Keraton Kuto Besak sedangkan Sultan Ahmad Najamuddin II pindah ke Keraton Kuto Lamo (Mahruf,1999:7).

Djohan Hanafiah (1986:67) dalam bukunya yang berjudul "Kuto Besak" memberikan analisis atas kebijakan Robinson, menurutnya:

"*Pertama*, kekuatan Sultan Mahmud Badaruddin II di Musi Rawas lebih besar jika dibandingkan dengan kekuatan Inggris untuk menyerangnya, kemungkinan akan mengalami kegagalan. Di samping itu ketidakmampuan dan ketidakpastian yang diharapkan dari Sultan Ahmad Najamuddin II. Bahkan seandainya kekuatan Inggris berhasil menekan musuh, keberhasilan ini akan membawa Sultan Mahmud Badaruddin II dan pengikutnya semakin jauh ke pedalaman dan akan mempersulit penaklukan dan penangkapannya. *Kedua*, rakyat terus mendesak kepada Sultan Ahmad Najamuddin II, agar pemerintahan Kesultanan Palembang dikembalikan kepada Sultan Mahmud Badaruddin II. *Ketiga*, keadaan negeri Palembang

sedang mengalami anarki dan kerusakan karena perang saudara. *Keempat*, pribadi yang superior dari Sultan Mahmud Badaruddin II dibandingkan saudaranya Sultan Ahmad Najamuddin II."

Kebijakan Mayor Robinson dalam mengatasi konflik dengan Sultan Mahmud Badaruddin II yang bertolak belakang dengan Raffles, membuat Raffles menjadi geram dan kemudian Mayor Robinson dipecat dari posisinya sebagai residen Pulau Bangka dan Palembang. Cookbrooke yang memimpin armada Inggris ke Palembang membacakan keputusan Raffles mengenai pembatalan kebijakan Robinson. Tanggal 12 Agustus 1813 perjanjian baru ditandatangani dan Ahmad Najamuddin II diangkat kembali menjadi sultan dengan gelar yang sama Sultan Ahmad Najamuddin II. Selain itu, Inggris juga mengancam Sultan Mahmud Badaruddin II untuk menyerahkan semua tanda kebesaran sultan (Mahruf,1999:7).

Akibat peristiwa tersebut, konflik internal antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II semakin memanas. Di sisi lain, terjadi dualisme kepemimpinan, Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat oleh Inggris secara undang-undang menguasai wilayah kesultanan, akan tetapi secara adat dan pengakuan rakyat kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II tidak lain hanya sebuah boneka bagi Inggris (Junaidi,2001:79). Secara penuh rakyat kesultanan masih mengakui status Sultan Mahmud Badaruddin II sebagai Sultan Palembang yang sah secara adat. Akibatnya sikap saling mengukudeta di antara kedua belah pihak yang menimbulkan perang saudara yang tak berkesudahan.

Sultan Mahmud Badaruddin II dengan segala kekuatan yang dimilikinya mengukudeta kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II. Kepala-kepala divisi yang di bawah pengaruh Sultan Mahmud Badaruddin II, melaksanakan

pemerintahan dengan cara sendiri-sendiri. Perampokan, penculikan-penculikan serta perdagangan budak merajalela dan kepala-kepala divisi membiarkannya. Rakyat diperas habis-habisan oleh kepala divisi untuk memperkaya diri. Perampokan terjadi sampai jauh ke daerah kesultanan, sampai ke daerah Inggris di Bengkulu. Pengaduan-pengaduan rakyat tidak dihiraukan, begitu juga sebaliknya pengaduan Inggris dari Bengkulu tidak juga dihiraukan (Mahruf,1999:8-9). Menganalisis sikap kudeta yang dilakukan oleh Sultan Mahmud Badaruddin II merupakan strategi untuk menanamkan rasa kebencian dan ketidakpercayaan rakyat terhadap Sultan Ahmad Najamuddin II. Dengan begitu Sultan Mahmud Badaruddin II akan memperoleh rasa simpati dari rakyat sehingga akan lebih mudah untuk menggerakkan massa mengulingkan kekuasaan Sultan Ahmad Najamuddin II.

Di sisi lain, Sultan Ahmad Najamuddin II tidak tinggal diam menghadapi kondisi tersebut. Dengan bantuan Inggris, Sultan Ahmad Najamuddin II melakukan pembersihan ke wilayah-wilayah pedalaman yang berkonflik. Sultan Ahmad Najamuddin II dengan segera mengantikan kepala-kepala divisi yang lama dengan kepala divisi baru yang pro dengan pemerintahannya di bawah proteksi kolonial Inggris untuk mencegah timbulnya pemberontakan oleh massa yang lebih besar. Seperti, ia mengangkat Rasyip anak Pangeran Pajar Bulan Kepala Sumbai Besar sebagai pejabat tinggi kesultanan di wilayah Pesemah sekaligus mengantikan kedudukan ayahnya sebagai Kepala Sumbai Besar dengan gelar Pangeran Tumenggung. Peristiwa ini merupakan peristiwa pertama dimana pergantian Kepala Sumbai Besar tidak dengan pemilihan rakyat, dimana lazimnya pemilihan Kepala Sumbai Besar dilakukan setelah Kepala Sumbai meninggal dan harus diganti (Mahruf,1999:7-8).

Sikap saling mengukudeta antara Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan

Ahmad Najamuddin II, secara sosiologi merupakan sikap yang berifat kontra produktif. Sifat kontra produktif merupakan tingkah laku individu yang bermaksud memojokan, merugikan atau melemahkan lawan mereka. Pada umumnya sifat kontra produktif berkaitan dengan kondisi psikologi seseorang yang disebut agresif. Perasaan agresif adalah keadaan internal yang tidak dapat diamati secara langsung (Sears, et al.1991:5).

Keagresifan, kekerasan, penguasaan dan otoritarianisme bisa menjadi produk fenomena kompensasi. Psikoanalisa meletakkan tekanan yang sangat besar terhadap ambivalensi perasaan manusia dan sikap manusia yang pada hakikatnya kontradikter. Keinginan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin II untuk menguasai dengan sikap otoritarian bisa juga menjadi akibat dari *will to power* dari seorang individu yang kuat dan penuh energi atau dari kelemahan psikologis, kekacauan dari dalam diri seperti ketidakmampuan untuk memperoleh respek orang lain (Duverger,2003:179).

Otoritarianisme, dominasi dan kekerasan masih mendapat penjelasan dari psikologi lainnya. Kesemuanya merupakan kompensasi dari kekecewaan dan kemunduran pribadi. Orang membalas dendam kepada yang lain karena tidak menyukainya, karena mempermainkan dirinya, karena merendahkan dirinya (Duverger,2003:180). Mengkaji lebih dalam mengenai sikap saling mengukudeta antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II, merupakan sikap kekecewaan dan kemunduran diri yang lahir di dalam diri mereka. Sultan Mahmud Badaruddin II begitu kecewa dengan sikap adiknya Sultan Ahmad Najamuddin II akibat pengkhianatan. Di sisi lain, dalam diri Sultan Ahmad Najamuddin II merasa dipermainkan dirinya dan direndahkan dirinya atas kedudukan sebagai sultan Palembang sehingga perlu membalas dendam atas kudeta

yang dilancarkan oleh kakaknya Sultan Mahmud Badaruddin II.

Konflik internal Kesultanan Palembang Darussalam tidak menemukan titik perdamaian yang jelas bahkan konflik semakin meruncing. Kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II sebagai sultan Palembang mulai menunjukkan tanda-tanda kelemahannya ketika disepakati Konvensi London 13 Agustus 1814 bahwa wilayah Bangka dan Palembang diserahkan dengan Belanda ditukar dengan daerah Cochin di Malabar kepada Inggris. Namun kembalinya Napoleon Bonaparte berkuasa di Perancis awal tahun 1815 menyebabkan pelaksanaan pengembalian jajahan Belanda tertunda sampai tahun 1816. Tanggal 19 Agustus 1816, penyerahan wilayah jajahan resmi dilakukan oleh Letnan Gubernur Jenderal Jhon Fendal pengganti Raffles dan tanggal 10 Desember 1816 diangkatlah K. Heijin sebagai Residen Palembang. Namun selama satu tahun pemerintahannya, K. Heijin lebih mementingkan diri sendiri dan memperkaya diri. Akibatnya dia dipecat dan residen Palembang tanggal 27 Oktober 1817 diserahkan kepada Komisaris Jenderal Herman Warner Muntinghe sebagai Residen Palembang baru (Mahruf,1999:10).

Tahun 1818, Muntinghe menjalankan instruksi rahasia yang diterimanya yaitu politik untuk mengakhiri konflik internal antara Sultan Ahmad Najamuddin II dengan Sultan Mahmud Badaruddin II. Politik baru ini meliputi penurunan Ahmad Najamuddin II yang diangkat Inggris sebagai Sultan dan mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi sultan serta secara bertahap menghilangkan kekuasaan sultan di daerah Palembang. Perundingan pertama dilakukan oleh Muntinghe dengan Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian dengan Sultan Ahmad Najamuddin II. Hasilnya adalah mengangkat kembali Sultan Mahmud Badaruddin II menjadi sultan dan Sultan Ahmad Najamuddin II mendapat pembayaran

dan menyerahkan semua sarana kebesaran sultan termasuk Benteng Kuto Besak. Persetujuan ini merupakan kematian bagi politik Kesultanan Palembang (Mahruf,1999:11).

Sultan Ahmad Najamuddin II yang diturunkan dari tahtanya segera menghubungi Inggris yang berkedudukan di Bengkulu. Raffles berpendirian bahwa Sultan Ahmad Najamuddin II yang diangkat oleh Inggris masih tetap berada di bawah proteksinya dan mengirim beberapa ratus pasukan melalui darat di bawah pimpinan Kapten Francis Salmon dan sampai ke Palembang tanggal 14 Juli 1818. Kemudian Sultan Ahmad Najamuddin II menaikkan bendera Inggris di Keraton Kuto Lamo dimana tempat berdiam sultan (Mahruf,1999:12).

Sikap ketidakberdayaan dan frustrasi yang terjadi di dalam diri Sultan Ahmad Najamuddin II ketika harus merelakan tahta sultan yang telah ia peroleh dengan susah payah dari kakaknya Sultan Mahmud Badaruddin II, membuatnya harus mencari dan mengharapkan perlindungan dari kolonial Inggris. Kolonial Inggris dianggapnya memiliki kemampuan dan kemampuan itu diharapkan dapat mengarahkan Sultan Ahmad Najamuddin II kembali menduduki tahta sultan di Kesultanan Palembang secara penuh. Jika dikaji hubungan Sultan Ahmad Najamuddin II dengan kolonial Inggris yang begitu erat, dapat dilihat ada hubungan yang saling membutuhkan satu sama lain atau bersimbiosis namun bukan berarti konflik yang ada diatasi dengan *problem solving*. Artinya kolonial Inggris dengan kedudukan Sultan Ahmad Najamuddin II memperoleh keuntungan yang lebih, sedangkan posisi Sultan Ahmad Najamuddin II hanya sebagai boneka Inggris. Secara psikologis, sikap Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan sikap ketergantungan terhadap kolonial Inggris.

Sikap ketergantungan Ahmad Najamuddin II terhadap kolonial Inggris,

senada dengan asumsi ketergantungan dalam ilmu psikologi sosial yang dikembangkan oleh Bion yang mengemukakan bahwa:

“Kelompok dianggap terbentuk karena adanya perasaan-perasaan ketidakberdayaan dan frustrasi di kalangan-kalangan anggotanya. Dalam keadaan yang tidak berdaya dan frustrasi ini, individu-individu anggota kelompok itu mencari dan mengharapkan perlindungan dan perawatan dari pemimpinnya. Pemimpin dianggap mempunyai kemampuan dan kemampuan itu diharapkan dapat mengarahkan perilaku kelompok dan interaksi antar anggota kelompok (Sarwono,1995:136).”

Di sisi lain, ketergantungan Ahmad Najamuddin II terhadap kolonial Inggris diakibatkan oleh janji yang berulang kali disampaikan dan selalu dipenuhi. Dengan demikian, Ahmad Najamuddin II berharap Raffles akan terus memberikan keuntungan baginya di masa mendatang (Pruitt dan Rubin,2003:121).

Sikap ketergantungan Sultan Ahmad Najamuddin II terhadap kolonial Inggris, kemudian membawa pasukan kolonial Inggris ke wilayah Kesultanan Palembang Darussalam mengundang reaksi keras dari Jenderal Muntinghe. Akibatnya terjadi perang, Jenderal Muntinghe berhasil melucuti tentara Inggris yang telah sampai ke Palembang dan mengirimnya kembali ke Bengkulu melalui Batavia. Ahmad Najamuddin II kemudian dikenakan tahanan rumah (Hanafiah,1989:74). Di lain pihak, Sultan Mahmud Badaruddin II tidak begitu menghiaraukan aksi yang dilakukan oleh adiknya karena secara pribadi Sultan Mahmud Badaruddin II sudah terlanjur kecewa. Diberlakukannya tahanan rumah kepada Sultan Ahmad Najamuddin II secara tidak langsung memberikan kedaulatan penuh kembali kepada Sultan Mahmud Badaruddin II atas Kesultanan Palembang Darussalam.

Setelah Ahmad Najamuddin II menjadi tahanan rumah, kemudian terdengar kabar bahwa Raffles mengirim kembali pasukan sebanyak 400 tentara di bawah pimpinan Hayes, yang pernah menjadi Residen Palembang untuk membantu memulihkan kedudukan Ahmad Najmuddin II. Oleh karena itu Muntinghe memutuskan untuk mengasingkan Ahmad Najamuddin II beserta 63 orang keluarga dan pengikutnya ke Cianjur, Jawa Barat pada tanggal 30 November 1818 (Mahruf,1999:12). Dengan diasingkannya Ahmad Najamuddin II dan pengikutnya ke Cianjur untuk sementara mengakhiri konflik internal di tubuh Kesultanan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badaruddin II memperoleh kedaulatan penuh atas Kesultanan Palembang Darussalam. Namun bagi Ahmad Najamuddin II perjuangannya memperoleh tahta kerajaan belumlah usai.

Setelah memperoleh kedaulatan penuh atas wilayah Kesultanan Palembang, Sultan Mahmud Badaruddin II mulai membangun pertahanan untuk menghindari perang yang diakibat eskalasi konflik-konflik eksternal dengan kolonial Belanda. Selain itu untuk mencegah konflik internal Sultan Mahmud Badaruddin II mengangkat anaknya Pangeran Ratu sebagai penerus tahta kesultanan dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin III. Namun Sultan Ahmad Najamuddin III tidak memerintah secara mutlak karena menurut adat seorang sultan digantikan kedudukannya setelah sultan meninggal, sedangkan ayah Sultan Ahmad Najamuddin III masih hidup (Mahruf,1999:10).

Eskalasi dari konflik eksternal dengan Belanda terus terjadi tanpa menemukan titik perdamaian walaupun konsesus terus dilakukan. Akibatnya peperangan dengan kolonial Belanda tak terelakkan. Tercatat, Kesultanan Palembang Darussalam pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II (1803-1821) mengalami tiga kali peperangan yang besar yaitu perang 12 Juni 1819 pasukan Belanda

dipimpin oleh Jenderal Muntinghe, perang 9-21 Oktober 1819 pasukan Belanda dipimpin oleh Schubert dan Walterbeek dan perang 9 Mei 1821 dipimpin oleh Markus de Kock (Aly,1968: 155).

Selama perang pertama dan kedua Kesultanan Palembang memperoleh kemenangan yang gemilang. Namun pada perang terakhir tahun 1821 Kesultanan Palembang harus menerima kekalahan. Salah satu penyebab kekalahan Kesultanan Palembang adalah adanya pengkhianatan kembali yang dilakukan oleh Ahmad Najamuddin II. Tanggal 28 April 1821, kolonial Belanda kembali melakukan politik adu domba, dengan membujuk Ahmad Najamuddin II yang dijanjikan jika Belanda memperoleh kemenangan maka anak Ahmad Najamuddin II, Pangeran Prabu Anom akan diangkat menjadi Sultan menggantikan Sultan Mahmud Badaruddin II dan Ahmad Najamuddin II akan bergelar Susuhunan Husin Dhiauddin serta tidak mencampuri urusan pemerintahan (Mahruf,1999:15).

Rasa kecewa dan frustrasi Ahmad Najamuddin II akibat penurunan tahta pada tahun 1818 oleh Belanda, kini mulai terobati ketika Mayor Jendral De Kock mencoba mengangkat kembali dirinya menjadi susuhunan dan anaknya Prabu Anom menjadi sultan Palembang. Akhirnya perang 1821 terjadi dan Sultan Mahmud Badaruddin II harus menyerah dengan Belanda dan kemudian Belanda mengasingkan Sultan Mahmud Badaruddin II dan keluarga ke Ternate pada tanggal 28 Juni 1821 (Mahruf,1999:16). Dengan pengasingan tersebut berakhir lah kedaulatan dan kekuasaan Sultan Mahmud Badaruddin II di Palembang.

Tanggal 18 Juli 1821, kolonial Belanda mengangkat Pangeran Prabu Anom menjadi sultan Palembang menggantikan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan gelar Sultan Ahmad Najamuddin IV, sedangkan ayahnya Ahmad Najamuddin II diangkat menjadi Susuhunan Husin Dhiauddin

(Mahruf,1999:16). Pada perkembangan selanjutnya, Sultan Ahmad Najamuddin IV hanyalah sebuah boneka bagi kolonial Belanda. Sultan Ahmad Najamuddin IV tidak memiliki kedaulatan penuh dalam menjalankan roda pemerintahan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas yang berjudul “Dualisme Kepemimpinan Kesultanan Palembang Darussalam :“Menguak” Perselisihan Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II” dapat disimpulkan bahwa terkait dengan konflik internal di Kesultanan Palembang Darussalam antara Sultan Mahmud Badaruddin II dengan Sultan Ahmad Najamuddin II merupakan konflik yang secara psikologi diakibatkan oleh rasa frustrasi, agresifitas, kekerasan, penguasaan dan otoritarianisme yang merupakan kompensasi dari kekecewaan dan kemunduran diri.

Dari konflik-konflik internal di atas, dengan penggunaan teori Ibnu Khaldun tentang teori *ashobiyah* dapat disimpulkan bahwa apabila ‘*ashobiyah* yang dimiliki oleh seorang penguasa telah melemah maka ia akan digantikan oleh ‘*ashobiyah* lain yang lebih kuat. Sekalipun dalam merebut kekuasaan negara akan terjadi pertarungan antar tokoh dengan basis pendukung yang berbeda-beda, namun hanya tokoh yang memiliki ‘*ashobiyah* paling kuat bisa terbentuk melalui koalisi beberapa ‘*ashobiyah* kecil (Affandi,2004:198).

Referensi

- Abdurrahman, Dudung .2011. *Metode Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak
- Affandi, Hakimul Ikhwan. 2004. *Akar Konflik Sepanjang Zaman: Elaborasi Pemikiran Ibn Khaldun*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset

- Akib, R.H.M. 1978. *Sejarah Perjuangan Sri Sultan Mahmud Badaruddin ke II*. Palembang: Angrek
- Aly, Salman. *Sejarah Kesultanan Palembang, dalam KHO Gadjahnata, Sri dan Edi Swasono*. 1968. *Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan*. Jakarta; UIN Press
- Duverger, Maurice. 1987. *Sosiologi Politik*. Jakarta: Rajawali Pers
- _____. 2003. *Sosiologi Politik*. Terj. Daniel Dhakidea. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Hanafiah, Djohan. 1986. *Perang Palembang 1819-1821 M: Perang laut Terbesar di Nusantara*. Palembang: Pariwisata Jasa Utama
- _____. 1989. *Kuto Besak; Upaya Kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Masagung
- _____. 1995. *Melayu-Jawa; Citra Budaya & Sejarah Palembang*. Jakarta: Raja Grapindo Persada
- Junaidi, Heri. 2001. *Sejarah Kudeta Dalam Kebudayaan Islam: Studi Kesultanan Palembang Darussalam* dalam Laporan Penelitian, tidak diterbitkan. Palembang: Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah.
- Mahruf, Kamil dkk. 1999. *Pesemah Sindang Merdika: 1821-1866*. Jakarta: Pustaka Asri
- PemProv. 1986. *Sejarah Perjuangan Sultan Mahmud badaruddin II: Pahlawan Kemerdekaan Nasional*. Palembang: Pemerintah Provinsi Daerah TK.I
- Pruitt, Dean & G. Jeffrey. Z. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sears, David O, et. al. 1991. *Psikologi Sosial*, terj. Micheal Adryanto. Jakarta: Erlangga
- Sarwono, Sarlito. 1995. *Psikologi Lingkungan*. Jakarta: Grasindo
- Utomo, Bambang Budi, dkk. 2005. *Kota Palembang; Dari Wanua Sriwijaya Menuju Palembang Modern*. Palembang : Peguyuban Masyarakat Peduli Musi